



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020





**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020



Daftar Isi

5-7	Keterbukaan Informasi Publik	18-29	Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
8	Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik	30	Penyebaran Informasi Publik melalui Media Streaming (TV Tani dan Radio Tani)
9	Visi dan Misi	32	Penyempurnaan Modul Aplikasi Pendukung Informasi Publik (Portal PPID)
10	Tugas dan Tanggung Jawab PPID	34	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Badan Publik
11	Tata Cara Permohonan Informasi	35	Kerjasama PPID Kementerian Pertanian dengan Stakeholder
12	Prosedur Permintaan Informasi Publik Kementerian Pertanian	35	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
13-15	Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020		
16-17	Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020		

Daftar Tabel

6	Tabel 1. Keputusan Pimpinan Unit Eselon I tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	34	Tabel 4. Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Pemeringkat Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kategori Eselon II
21	Tabel 2. Jadwal Bimtek Online Sesi I dan II	35	Tabel 5. Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Pemeringkat Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kategori Eselon III
34	Tabel 3. Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Pemeringkat Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kategori Eselon I		

Daftar Grafik

15	Grafik 1. Permohonan Informasi Publik dari bulan Januari – Desember Tahun 2020	15	Grafik 2. Rekap Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2020
----	--	----	---

Daftar Gambar

7	Gambar 1. Struktur Organisasi	30	Gambar 15. Bimtek PPID Sesi I dan II
8	Gambar 2. Motto dan Maklumat Pelayanan di Kementerian Pertanian	31	Gambar 16. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik
9	Gambar 3. Visi Dan Misi PPID	40	Gambar 17. Penyerahan Piagam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
12	Gambar 4. Tata Cara Permohonan Informasi	41	Gambar 18. Webinar Keterbukaan Informasi Publik
13	Gambar 5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik 2020	42	Gambar 19. Site Portal PPID Utama Kementerian Pertanian
19	Gambar 6. Waktu Pelayanan Harian Informasi Publik di Kementerian Pertanian	43	Gambar 20. Pada lembar permohonan dashboard petugas PPID terdapat tombol verifikasi
22	Gambar 7. Bimtek PPID Sesi I dan II	44	Gambar 21. Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengumumkan Predikat Badan Publik Informatif untuk Kementerian Pertanian secara virtual melalui zoom meeting
23	Gambar 8. Bimtek PPID Sesi I dan II		
24	Gambar 9. Bimtek PPID Sesi I dan II		
25	Gambar 10. Bimtek PPID Sesi I dan II		
26	Gambar 11. Bimtek PPID Sesi I dan II		
27	Gambar 12. Bimtek PPID Sesi I dan II		
28	Gambar 13. Bimtek PPID Sesi I dan II		
29	Gambar 14. Bimtek PPID Sesi I dan II		

#1

Keterbukaan Informasi Publik



Informasi merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik.

Begitu pun Badan Publik harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan

pemerintahan juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. UU KIP ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Pertanian yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerja dan unit pelaksana teknis.

Sebagai wujud komitmen Kementerian Pertanian dalam upaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Menteri Pertanian telah menunjuk Atasan PPID Kementerian Pertanian, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian bersama PPID Utama dan 234 Pejabat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Kementerian Pertanian, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/KPTS/OT.050/A/9/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 berikut.



Tabel 1.

Keputusan Pimpinan Unit Eselon I tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Unit Eselon I

Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian**

Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Nomor 01.02/Kpts/OT.050/B/01/2020

**Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan**

Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 111/
SK.310/C/11/2018

**Direktorat Jenderal
Hortikultura**

Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura
Nomor 91/Kpts/HK.320/D/1/2020

**Direktorat Jenderal
Pernakakan dan Kesehatan Hewan**

Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020

**Direktorat Jenderal
Perkebunan**

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan
Nomor 176/Kpts/HM.130/5/2020

**Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian**

Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Nomor 211.3/Kpts/HM.130/H/03/2020

Badan Ketahanan Pangan

Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan
Nomor 12/Kpts/OT.050/J/02/2018

Badan Karantina Pertanian

Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
Nomor 1854/Kpts/OT.010/K/08/2019

**Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia**

Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Nomor 70/Kpts/HM.110/1/04/19

Inspektorat Jenderal

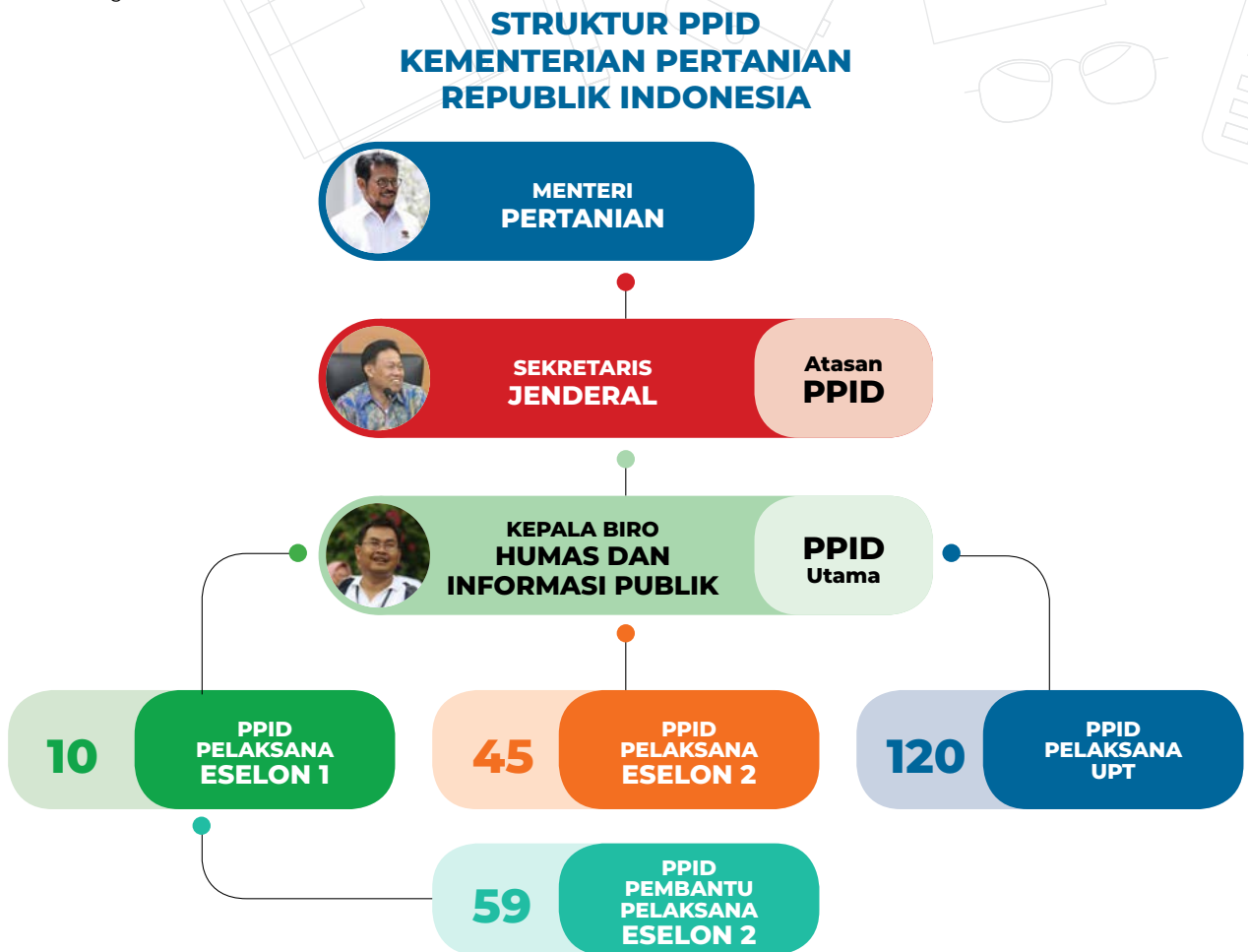
Surat Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor B-346/Kpts/OT.050/G/01/2018

Sekretariat Jenderal

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor 3057/Kpts/OT.050/08/2019

Berikut ini struktur organisasi PPID Kementerian Pertanian sebagaimana dijelaskan pada gambar 1

Gambar 1.
Struktur Organisasi



Sesuai gambar 1, lebih lanjut dijelaskan mengenai jabatan sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Pertanian Nomor 618/KPTS/OT.050/A/9/2020, adalah sebagai berikut :

1. Atasan PPID Kementerian Pertanian dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
2. PPID Utama Kementerian Pertanian dijabat oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik.
3. PPID Pelaksana Eselon I dijabat oleh pejabat Eselon I

4. PPID Pelaksana Eselon II dijabat oleh pejabat Eselon II
5. PPID Pelaksana UPT
6. PPID Pembantu Pelaksana Eselon 2

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama Kementerian Pertanian dibantu oleh 10 PPID Pelaksana Eselon I, 45 PPID Pelaksana Eselon II, 120 PPID Pelaksana UPT dan 59 PPID Pembantu Pelaksana Eselon II dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

#2

Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Gambar 2.
Motto dan Maklumat Pelayanan di Kementerian Pertanian



Motto Pelayanan Kementerian Pertanian



CEPAT



TEPAT



AKURAT

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
ttd
Momon Rusmono

#3

Visi dan Misi

Gambar 3.
Visi Dan Misi PPID



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

VISI

Terwujudnya dan Berfungsinya Unit Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang Terbuka, Bertanggung Jawab serta Mudah Diakses

MISI

1

Mendorong Keterbukaan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Kebijakan Kementerian Pertanian

2

Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat, dan Bertanggung Jawab

3

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

#4

Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-

masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10)

	PPID UTAMA	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian	✓	✓	✓
Daftar informasi publik	✓	✓	✓
Pengujian konsekuensi	✓	*	*
Klasifikasi informasi publik	✓	*	*

Catatan: (✓) mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan, (*) menyiapkan bahan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait TIK (Permentan No. 25/2016 Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011)

	PPID UTAMA	PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana
Pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)	✓	*
Penyediaan server penyimpanan e-dokumen	✓	*
Penyediaan hardware di UK/UPT	*	✓
Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT	*	✓
Monev pelaksanaan PID	✓	✓
Penyediaan konten elektronik	✓	✓

Catatan: (✓) mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan

#5

Tata Cara Permohonan Informasi

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah

disediakan oleh Kementerian Pertanian. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID (<http://ppid.pertanian.go.id>); Email (contact.us.layanan-ip@pertanian.go.id); dan Counter Layanan Meja Informasi.

Mekanismenya sebagai berikut :

Langkah

1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah

2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok, dan menyerahkan foto copy data diri sesuai dengan persyaratan.

Langkah

3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah

4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah

5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah

6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah

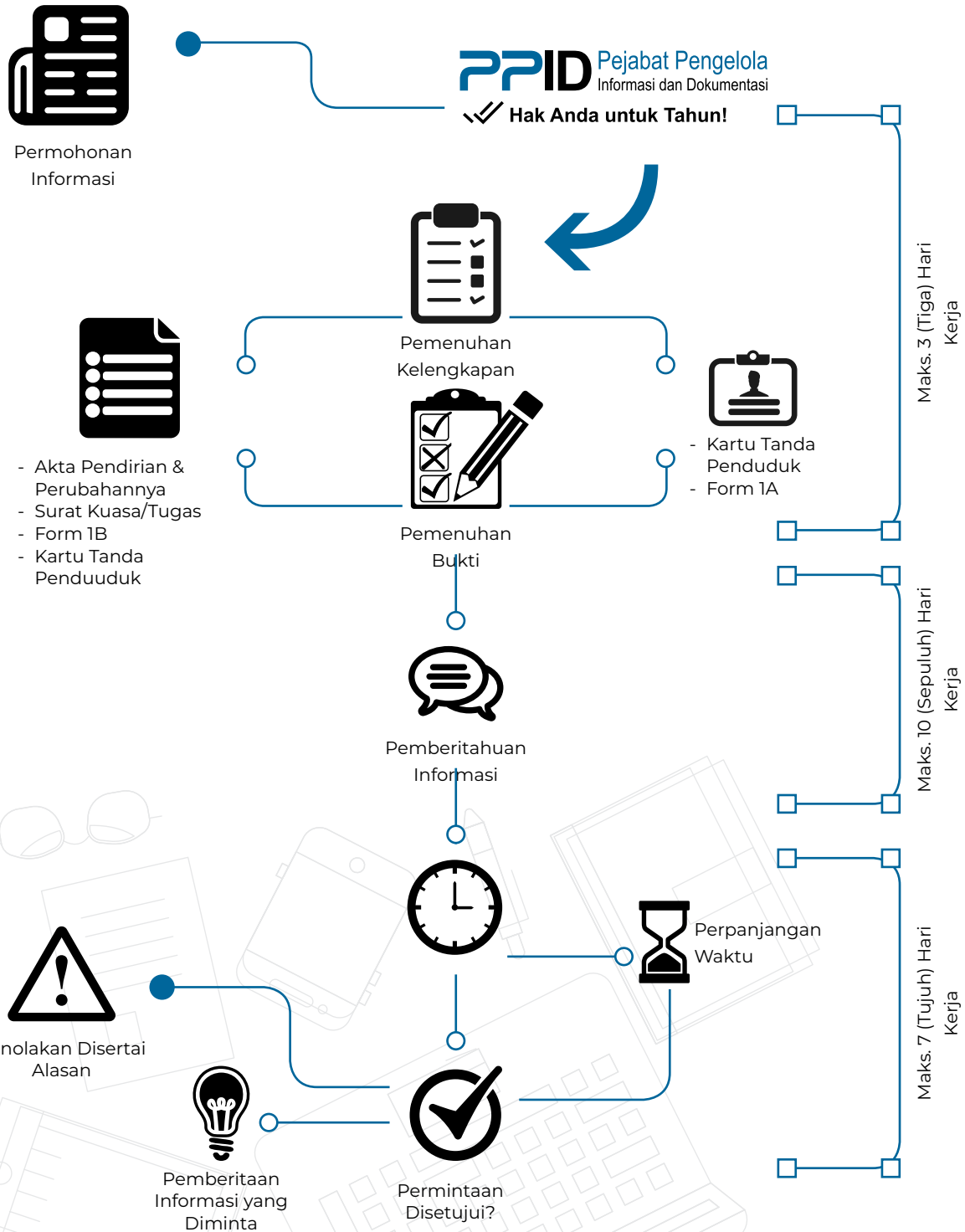
7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi. Sebagaimana Gambar 4 berikut

#6

Prosedur Permintaan Informasi Publik Kementerian Pertanian

Gambar 4.
Tata Cara Permohonan Informasi



#7

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyerang di Indonesia. Kehidupan masyarakat tidak lagi seperti sedia kala. Perubahan itu terjadi di seluruh sektor, tidak terkecuali pemerintahan. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah tentu tidak boleh absen dalam melayani warganya. Pelayanan publik tetap wajib berjalan sebagaimana mestinya namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, publik merasa terlayani sekaligus aman dan kualitas pelayanan pun terjaga.

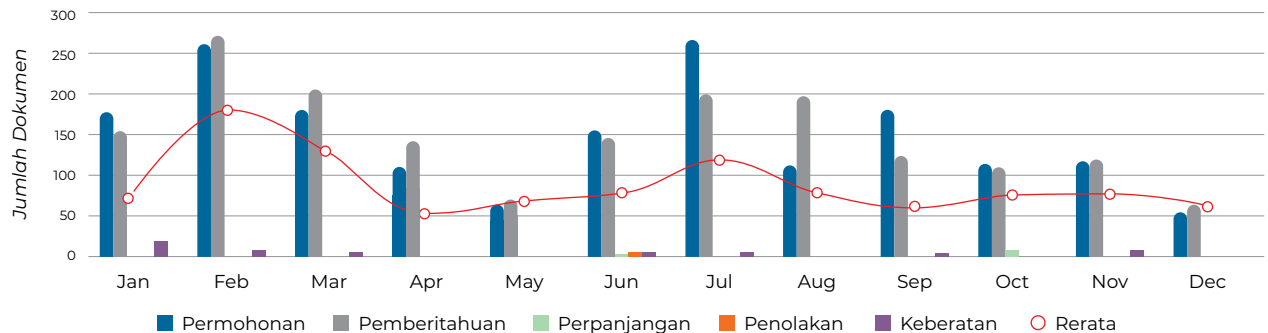
Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2020, telah menerima 1771 permohonan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dengan

rincian 1786 pemberitahuan, 9 perpanjangan, 10 penolakan serta 32 keberatan.

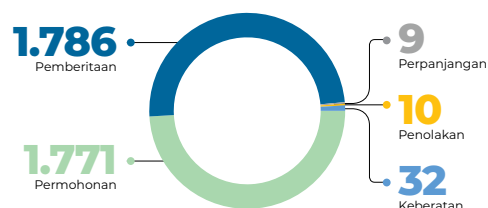
Permohonan informasi publik bisa dilakukan baik secara langsung ke Desk Pelayanan Informasi Publik di seluruh Unit Kerja/UPT Kementerian Pertanian maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<https://ppid.pertanian.go.id>). Namun saat pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik lebih banyak dilakukan secara online melalui portal PPID, jika ada pemohon informasi yang datang langsung ke PPID utama harus sesuai protokol kesehatan. Rata-rata pelayanan informasi publik pada tahun 2020 yaitu 9 Hari 16 jam 11 menit 56 detik. Dengan waktu pelayanan tercepat yaitu 53 detik. Seperti Gambar 5.

Gambar 5.
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik 2020

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID Tahun 2020



Statistik IP



Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama

Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama	Rata-rata Pelayanan
1 menit 38 detik	6 bulan 17 hari 20 jam 9 menit 31 detik	3 hari 21 jam 31 menit 47 detik

Pelayanan Keberatan di PPID Utama

Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama	Rata-rata Pelayanan
1 menit 38 detik	6 bulan 17 hari 20 jam 9 menit 31 detik	3 hari 21 jam 31 menit 47 detik

#7

**Rekapitulasi
Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2020**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAYANAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK DAN AGRIBISNIS
TIDAK DI PUNGUT BIAYA#**

GRATIS



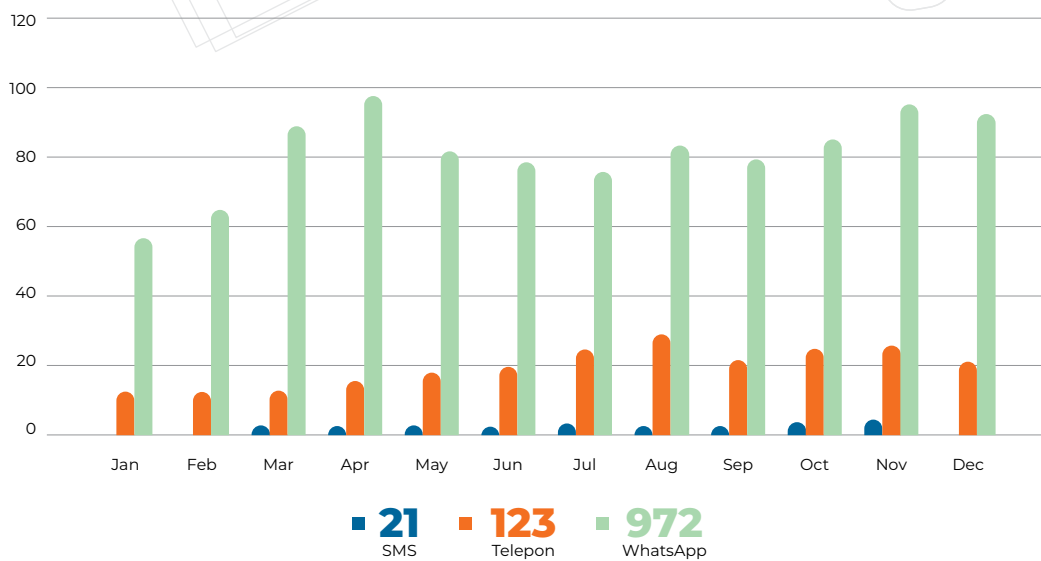
*#Biaya Penggandaan, materai dan lain-lain
dibebankan pada pemohon Informasi*

**Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Republik Indonesia**

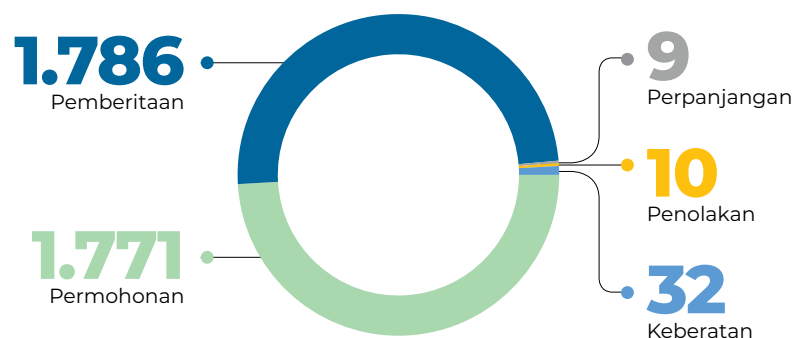
PPID selain melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui Desk Pelayanan Informasi dan Portal PPID, juga menerima permohonan informasi melalui Telepon, SMS, serta WhatsApp. Pelayanan informasi melalui

nomor handphone layanan informasi publik sepanjang tahun 2020 adalah 993 permohonan, dengan rincian 230 telepon, 21 SMS dan 972 WhatsApp yang telah diselesaikan semua permohonannya. Seperti Grafik 1

Grafik 1.
 Permohonan Informasi Publik dari bulan Januari – Desember Tahun 2020



Grafik 2.
 Rekap Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2020



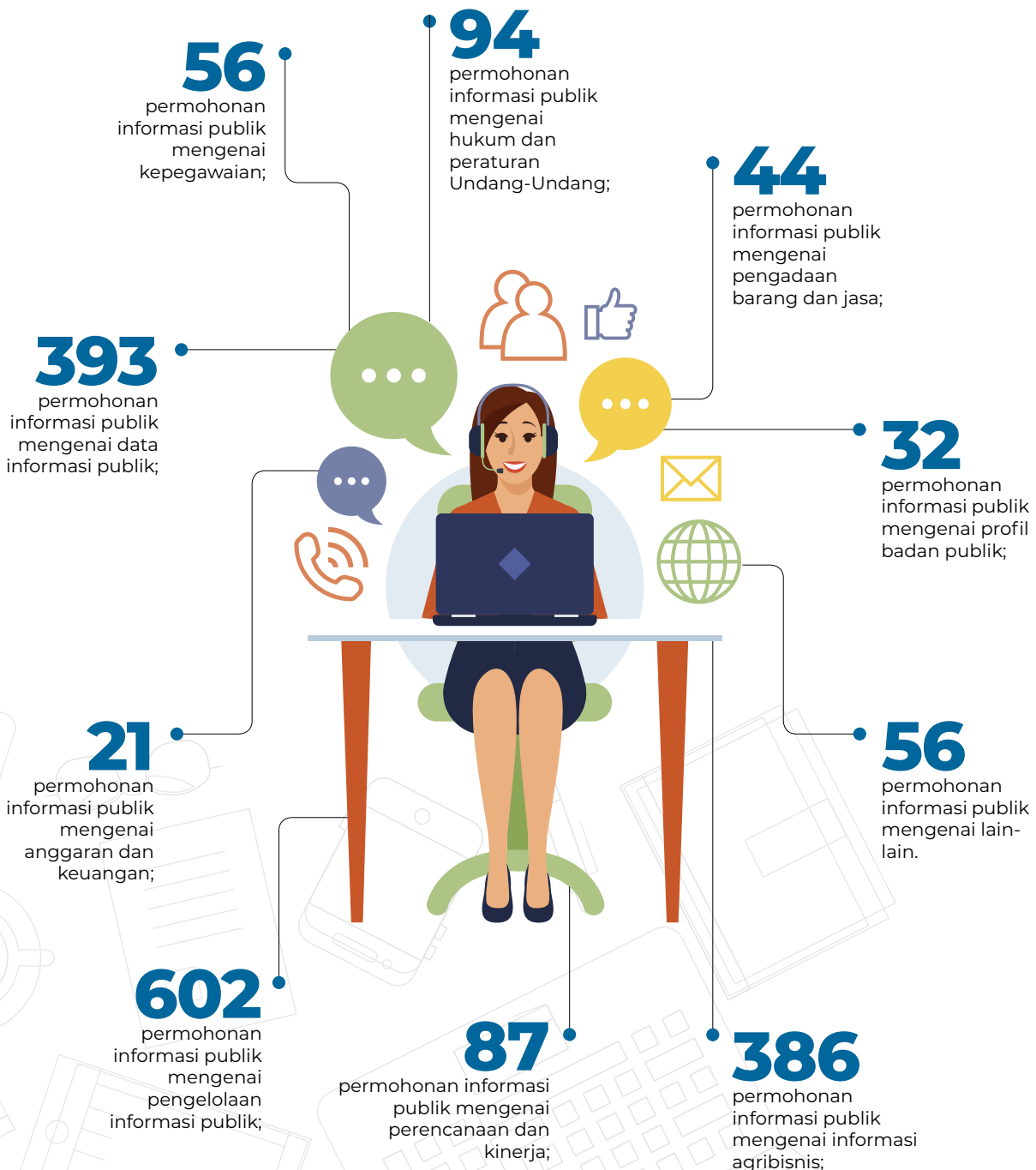
Dalam rekap pelayanan informasi publik pada Portal PPID Utama Kementerian Pertanian terdapat 10 penolakan permohonan (seperti grafik 2). Alasan penolakan dikarenakan tidak disertai permohonan tertulis resmi, informasi yang diminta tersedia di Kementerian/Lembaga lain, yang bersangkutan membuat klarifikasi

pembatalan permohonan melalui aplikasi whatsapp serta karena informasi yang diminta merupakan informasi publik yang dikecualikan. Sedangkan total permohonan yang mengajukan keberatan terdapat 32 keberatan. Semua total keberatan yang ditujukan ke PPID Utama sudah diselesaikan secara internal.

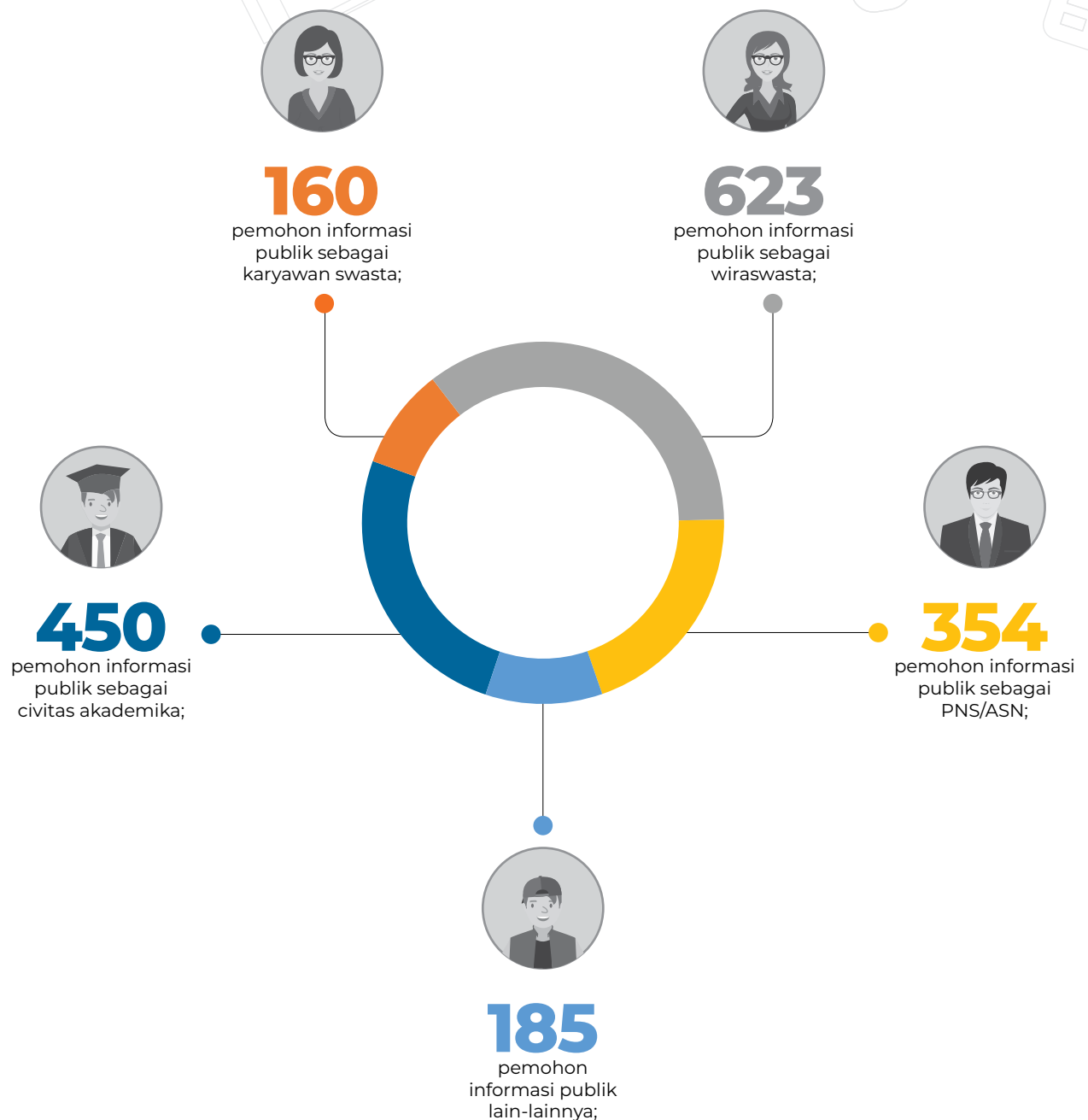
#8

Statistik Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan katagori informasi yang diminta, dapat dirinci sebagai berikut:



Selanjutnya, kategori pekerjaan pemohon informasi publik yang diajukan oleh permohonan informasi publik, dapat dirinci sebagai berikut:



#9

Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Utama Kementerian Pertanian yang berada di Sekretariat Jenderal mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinir dan mendorong PPID di seluruh unit kerja di Kementerian Pertanian guna meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.

Sepanjang tahun 2020, Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah program dan kegiatan untuk mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Masa depan pangan Indonesia akan sangat tergantung dari kinerja sektor pertanian, Untuk itu, Kementerian Pertanian telah mencanangkan sasaran umum kebijakan dengan merumuskan langkah dan strategi pembangunan pertanian mulai dari penetapan subjek, objek, metodologi, serta target yang akan dicapai. Namun demikian, Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban kepada publik, untuk menyampaikan pertanggungjawaban dari program dan kebijakan yang dijalankan tersebut. Karena itu, peran PPID sebagai garda terdepan

dalam menyampaikan informasi publik sangat penting.

Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terkait kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam tugasnya PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Berbagai peraturan diterbitkan sebagai rujukan untuk (1) memberikan standar bagi badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik termasuk Sekretariat Jenderal dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (2) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (3) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Waktu Pelayanan Harian Informasi Publik

Senin s/d Kamis
Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat 12.00 - 13.00 WIB

Jum'at
Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat 11.00 - 13.00 WIB



ppid.pertanian.go.id

Gambar 6.
Waktu Pelayanan Harian Informasi Publik di Kementerian Pertanian



Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kinerja PPID. Untuk tahun 2020 Kementerian Pertanian masih fokus pada peningkatan penguatan sektor sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas PPID Kementerian Pertanian mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Pertanian sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2010).

Di tengah kondisi darurat kesehatan akibat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penguatan SDM Kementerian Pertanian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya yaitu bimbingan teknis secara online melalui zoom meeting. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu tentang tata cara pemanfaatan sistem aplikasi Portal PPID dalam mengelola permohonan layanan informasi publik (Silayan online), menu transparansi kerja, menu database dokumen, penyusunan daftar informasi publik, implementasi keterbukaan informasi publik serta penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan unit kerja masing-masing.

Selanjutnya dilakukan webinar keterbukaan informasi publik dengan narasumber Tenaga Ahli dan Komisioner KIP, sosialisasi internal UK/UPT tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama terkait pengelolaan dokumen informasi, monitoring dan implementasi tindak lanjut hasil pemeringkatan

keterbukaan informasi publik serta menyamakan persepsi pelayanan informasi dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup Kementerian Pertanian. Dan puncak kegiatan tahunan PPID dituangkan dalam kegiatan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian, yang dilakukan secara offline dan online. Selanjutnya dilakukan webinar terkait Monitoring dan Evaluasi PPID.

a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik

Tahun 2020 adalah masa pandemic Covid-19, dimana semua kegiatan aktivitas pelayanan dan pengelolaan informasi lebih banyak dilakukan secara virtual atau online. Begitupun pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik. Format bimtek dilakukan melalui zoom meeting yang diikuti oleh pejabat dan petugas PPID UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian, format ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan bimtek di tahun-tahun sebelumnya, masih belum maksimalnya hasil peningkatan kapasitas sumber daya pelayanan informasi publik karena terdapat beberapa petugas yang mengikuti kegiatan tersebut bukan yang mengelola informasi publik di Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis, belum adanya keseriusan dalam menindaklanjuti hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik serta perlunya perhatian Pimpinan UPT terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik khususnya penyediaan informasi publik secara digital. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2020 dilakukan secara lebih intensif dan efektif dengan mengundang PPID Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan 9 (sembilan) kali Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik secara online yang dibagi 2 sesi yaitu sesi I pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan sesi II pukul 13.00 s.d 15.00 WIB.

Tabel 2.

Jadwal Bimtek Online Sesi I dan II

Tgl.	20 April 2020	21 April 2020	22 April 2020	23 April 2020	24 April 2020	27 April 2020	28 April 2020	29 April 2020	30 April 2020
Sesi I	1 Direktorat Jenderal Perkebunan	1 Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi	1 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	1 Badan Karantina Pertanian	1 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi	1 Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	1 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	1 Inspektur Jenderal
	2 Direktorat Perbenihan Perkebunan	2 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	2 Badan Ketahanan Pangan	2 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku	2 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan	2 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam	2 Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	2 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	2 Direktorat Jenderal Hortikultura
	3 Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	3 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	3 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara	3 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara	3 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung	3 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	3 Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	3 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Indrapuri	3 Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia
	4 Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	4 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	4 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo	4 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua	4 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	4 Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin	4 Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	4 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Palaihari	4 Balai Uji Terap dan Teknik Metode Karantina Pertanian
	5 Direktorat Perindukan Perkebunan	5 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	5 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah	5 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat	5 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak	5 Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	5 Balai Besar Peternakan dan Kesehatan Hewan Cinagara	5 Balai Embrio Ternak Cipelang	5 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar
	6 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	6 Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	6 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan	6 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat	6 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare	6 Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	6 Balai Pelatihan Pertanian Jambi	6 Balai Inseminasi Buatan Lembang	6 Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung
	7 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	7 Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang	7 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara	7 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau	7 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar	7 Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	7 Balai Pelatihan Pertanian Lampung	7 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Siborong-Borong	7 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang
	8 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	8 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta	8 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali	8 Loka Penelitian Penyakit Tungro Lanrang	8 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon	8 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura	8 Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	8 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Sembawa	8 Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang
	9 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	9 Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	9 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat	9 Loka Penelitian Sapi Potong Grati	9 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong	9 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	9 Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	9 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Pandang Mangatas	9 Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang
	10 Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	10 Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	10 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur	10 Loka penelitian Kambing Potong Sei Putih	10 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke	10 Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan	10 Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	10 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Denpasar	10 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru

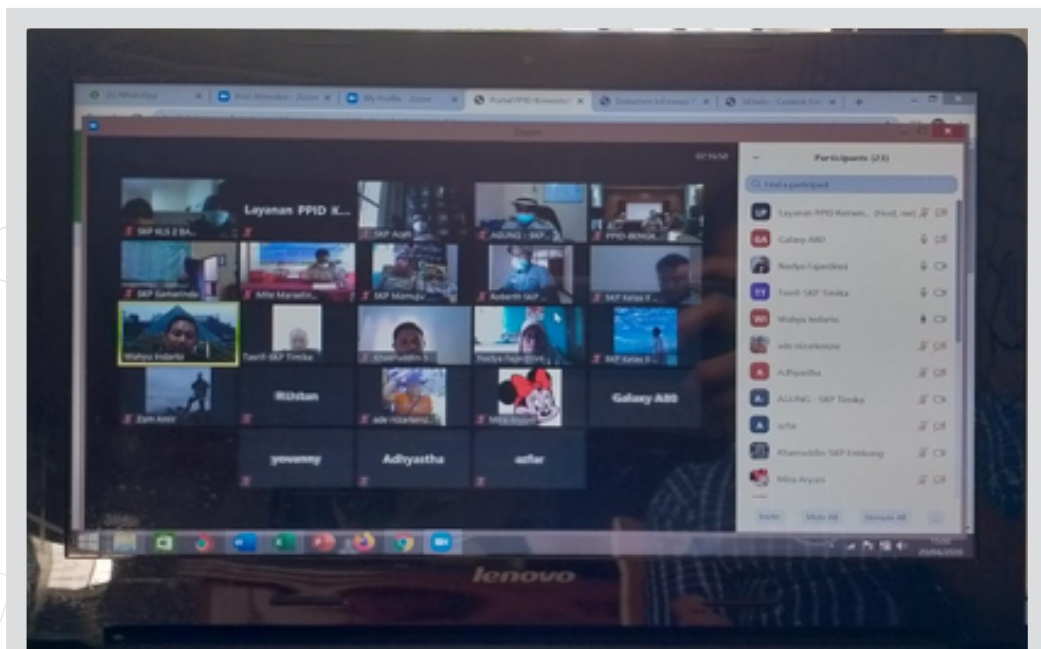
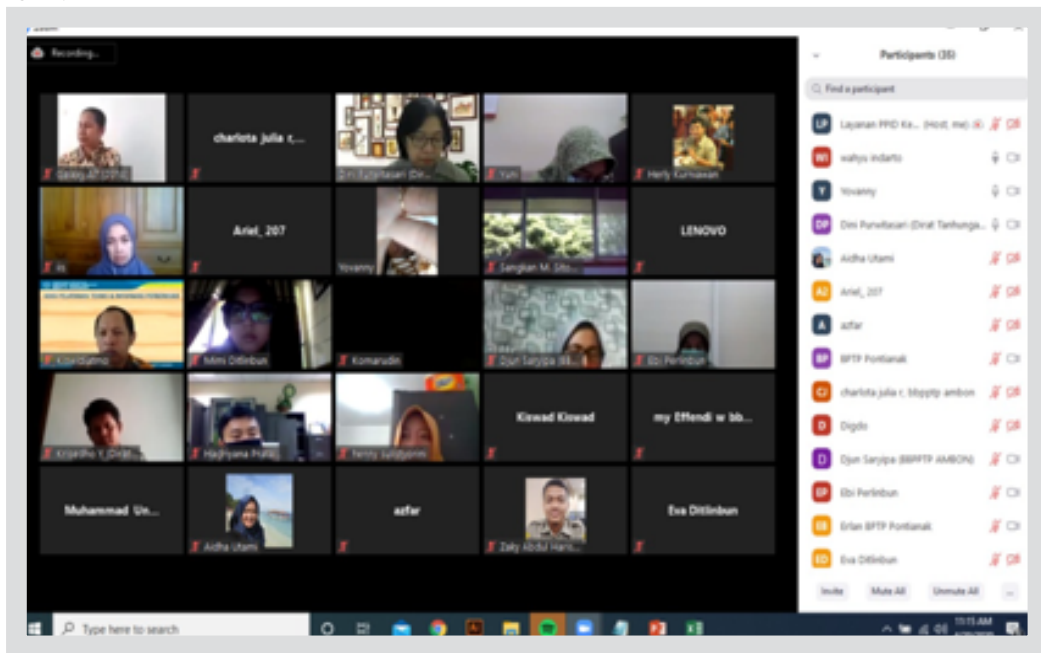
Tgl.	20 April 2020	21 April 2020	22 April 2020	23 April 2020	24 April 2020	27 April 2020	28 April 2020	29 April 2020	30 April 2020
Sesi II	1 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika	1 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	1 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang	1 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta	1 Balai Besar Penelitian Veteriner	1 Balai Penelitian Jeruk dan Buah Sub Tropika	1 Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	1 Pusat Veteriner Farma Surabaya
	2 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda	2 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh	2 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang	2 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten	2 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	2 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	2 Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta	2 Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur
	3 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh	3 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara	3 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	3 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	3 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat	3 Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	3 Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar	3 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	3 Balai Besar Veteriner Maros
	4 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bengkulu	4 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat	4 Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	4 Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	4 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	4 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanenan	4 Balai Penelitian Tanaman Palma	4 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	4 Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Batu Raden
	5 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong	5 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau	5 Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman	5 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu	5 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta	5 Balai Pengelola Alih Teknologi	5 Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Alam	5 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	5 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
	6 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	6 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung	6 Balai Veteriner Medan	6 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya	6 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur	6 Balai Penelitian Tanaman Serealia	6 Balai Penelitian Ternak	6 Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian	6 Balai Besar Veteriner Denpasar
	7 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju	7 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi	7 Balai Veteriner Bukit Tinggi	7 Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo	7 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat	7 Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian	7 Balai Penelitian Tanaman Lahan Rawa	7 Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	7 Balai Besar Veteriner Wates
	8 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari	8 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu	8 Balai Veteriner Bandar Lampung	8 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan	8 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah	8 Balai Penelitian Tanaman Sayuran	8 Balai Penelitian Tanah	8 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	8 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Padi
	9 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun	9 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan	9 Balai Veteriner Banjarbaru	9 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate	9 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan	9 Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika	9 Balai Penelitian Agroklimat dan Higirolgi	9 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	9 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
	10 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	10 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung	10 Balai Veteriner Subang	10 Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari	10 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	10 Balai Penelitian Tanaman Hias	10 Balai Penelitian Lingkungan Pertanian	10 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	10 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Genetika Pertanian

#9

Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan Bimtek secara online dalam 2 sesi yaitu:

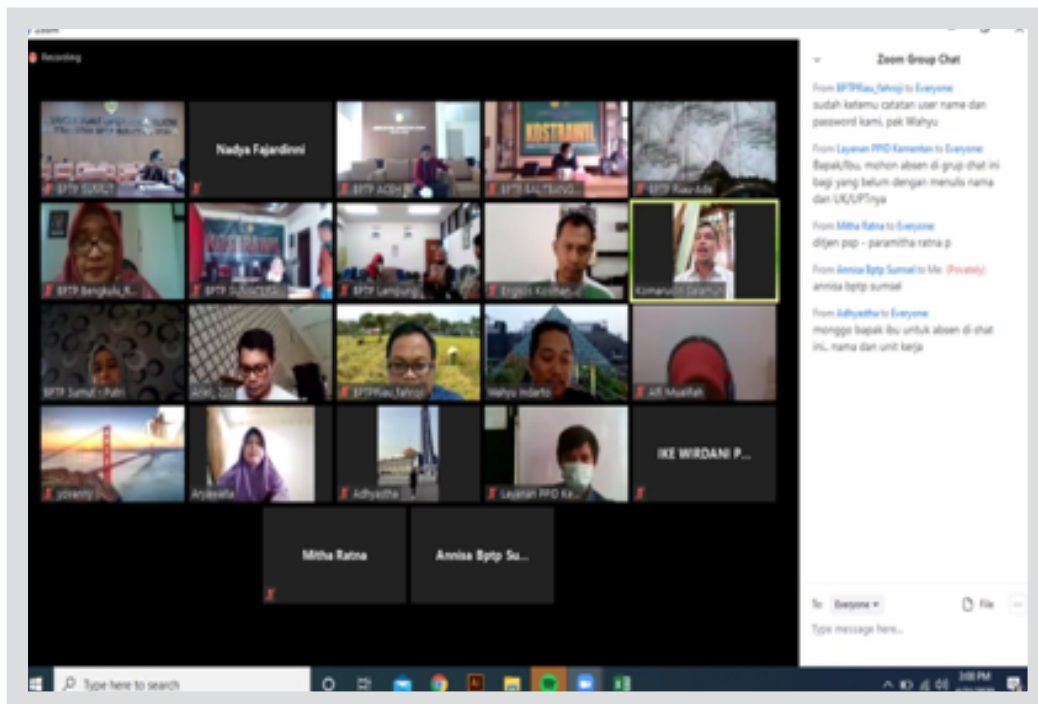
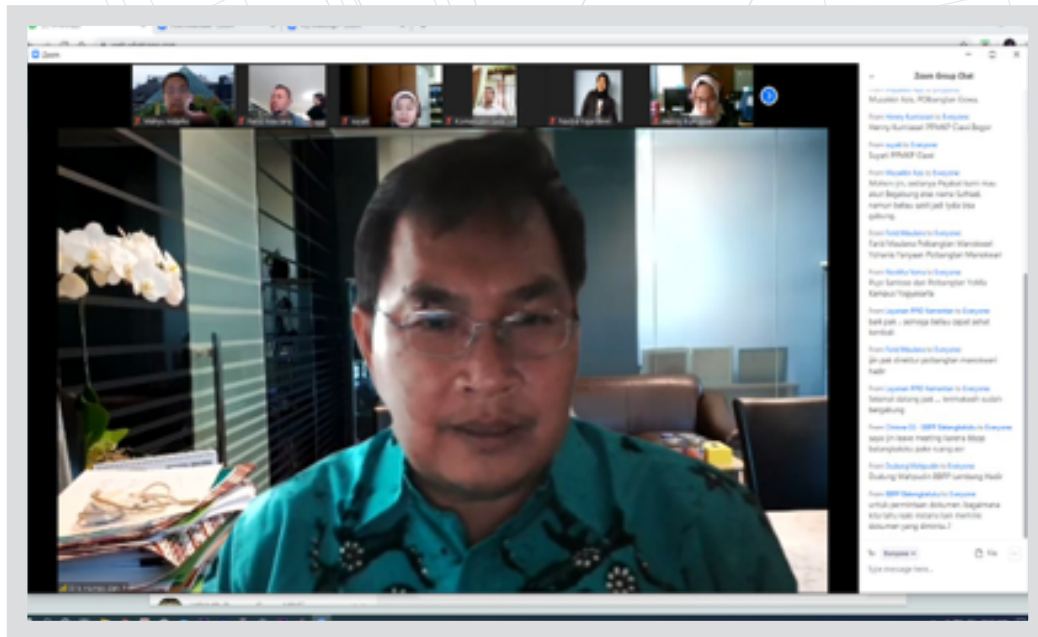
- Bimtek Online Sesi I dan II tanggal 20 April 2020, sesi I diikuti oleh PPID Direktorat Jenderal Perkebunan bersama UK/UPT dan sesi ke II diikuti oleh Badan Karantina Pertanian bersama UK/UPT.



Gambar 7. Bimtek PPID Sesi I dan II

#9 Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- Bimtek Online Sesi I dan II tanggal 21 April 2020, sesi I diikuti oleh PPID PPMKP Ciawi, Polbangtan dan BBPP. Sesi II diikuti oleh Direktorat Jenderal PSP dan BPTP.

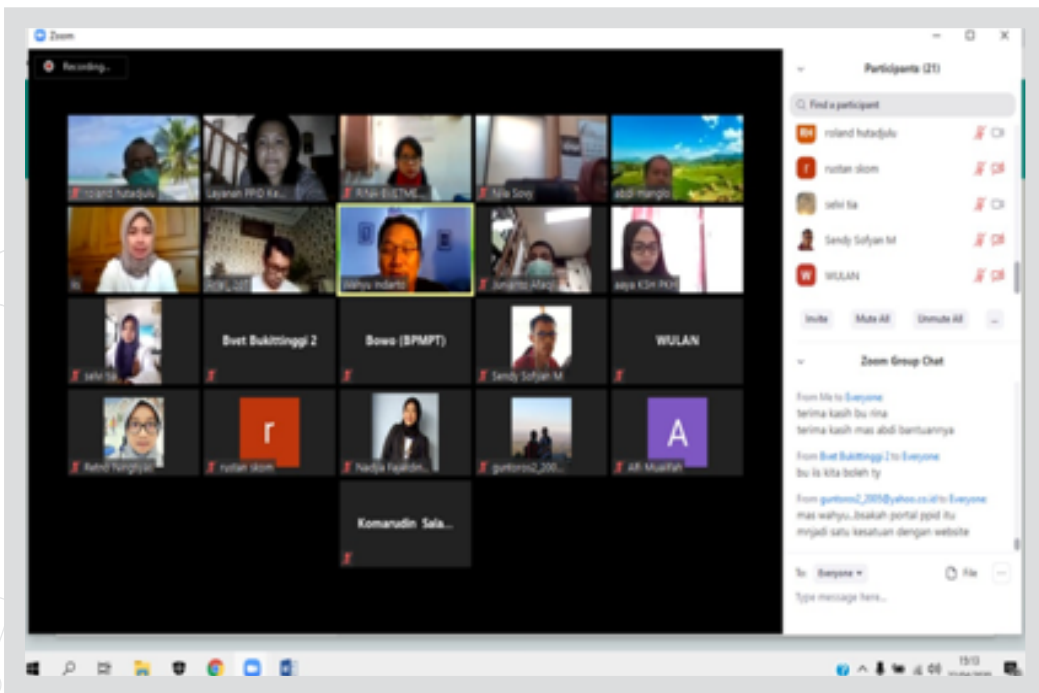
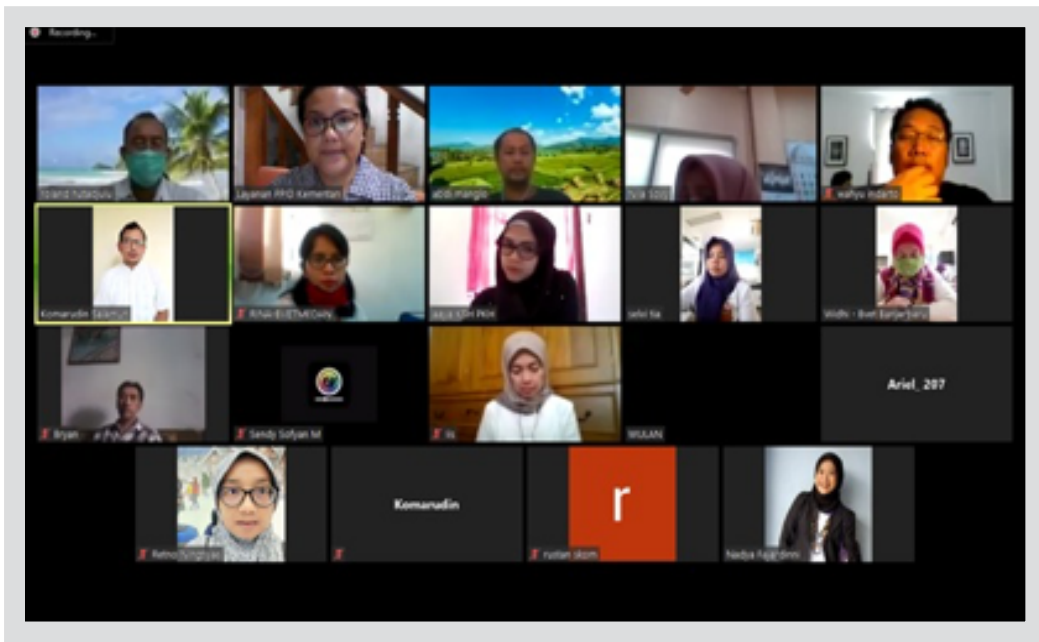


Gambar 8.
Bimtek PPID Sesi I dan II

#9

Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

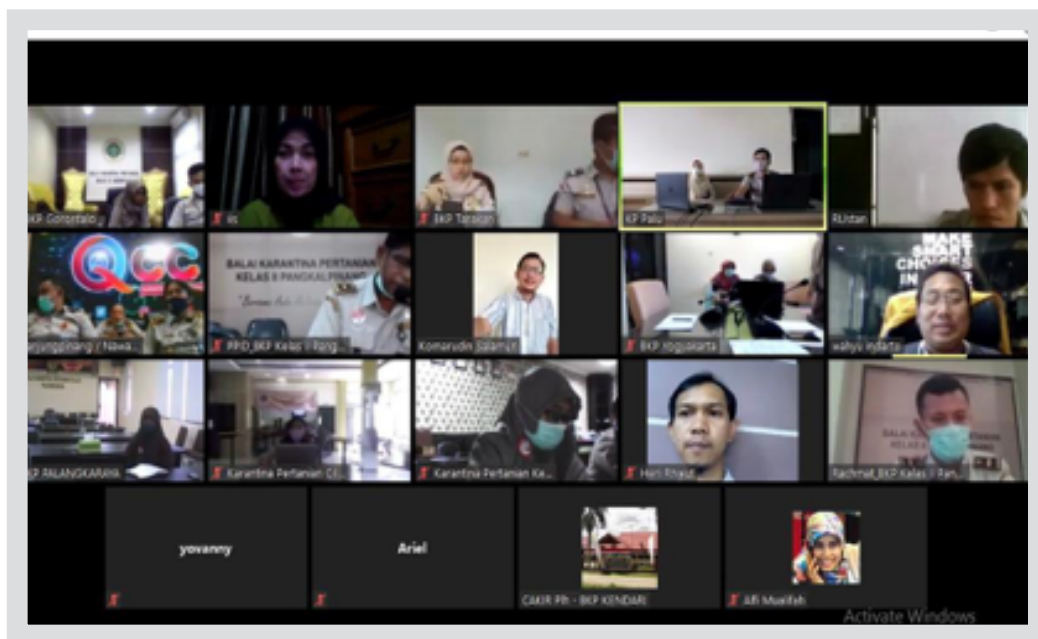
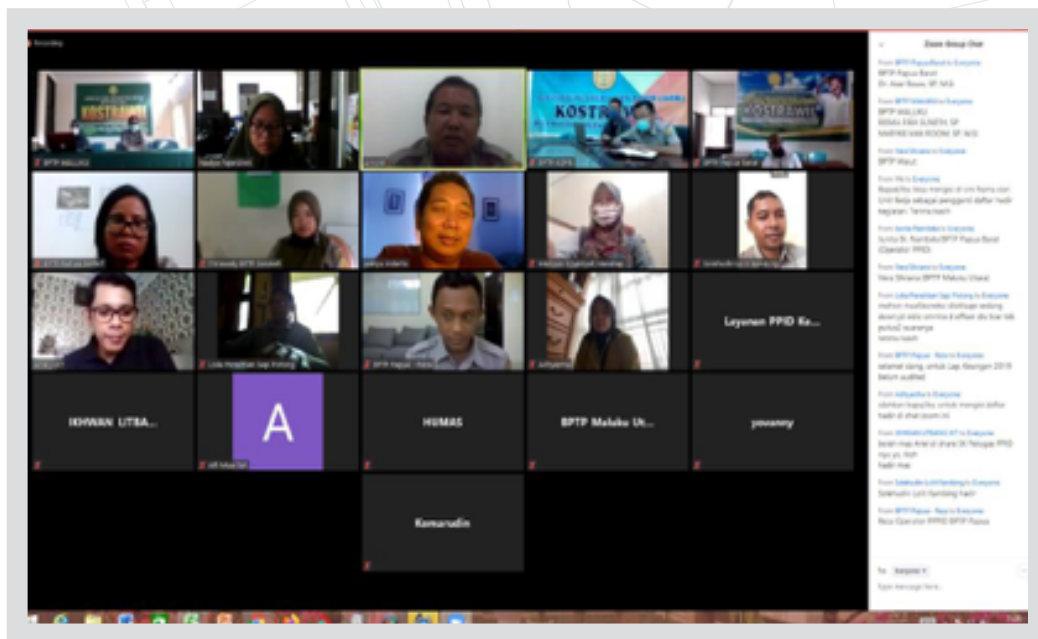
- Bimtek Online Sesi I dan II tanggal 22 April 2020, sesi I diikuti oleh PPID BPPSDMP, BKP dan BPTP. Sesi II diikuti oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal PKH, BBOPT, BBPPMBTPH dan BBVet.



Gambar 9.
Bimtek PPID Sesi I dan II

#9 Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- Bimtek Online Sesi I dan II tanggal 23 April 2020, sesi I diikuti oleh PPID Badan Litbang Pertanian, BPTP, dan Loka Penelitian. Sesi II diikuti oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II lingkup Kementerian Pertanian.

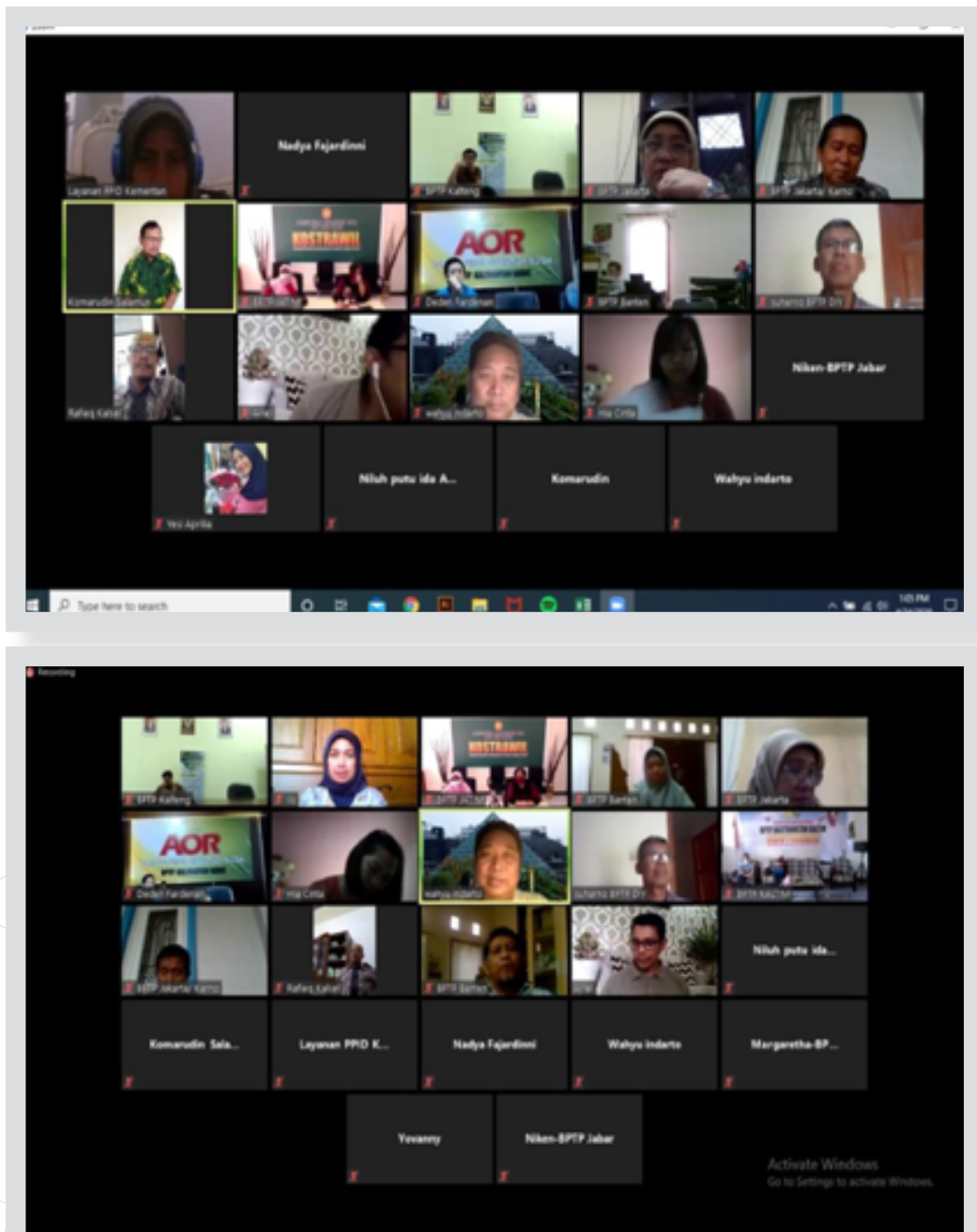


Gambar 10.
Bimtek PPID Sesi I dan II

#9

Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

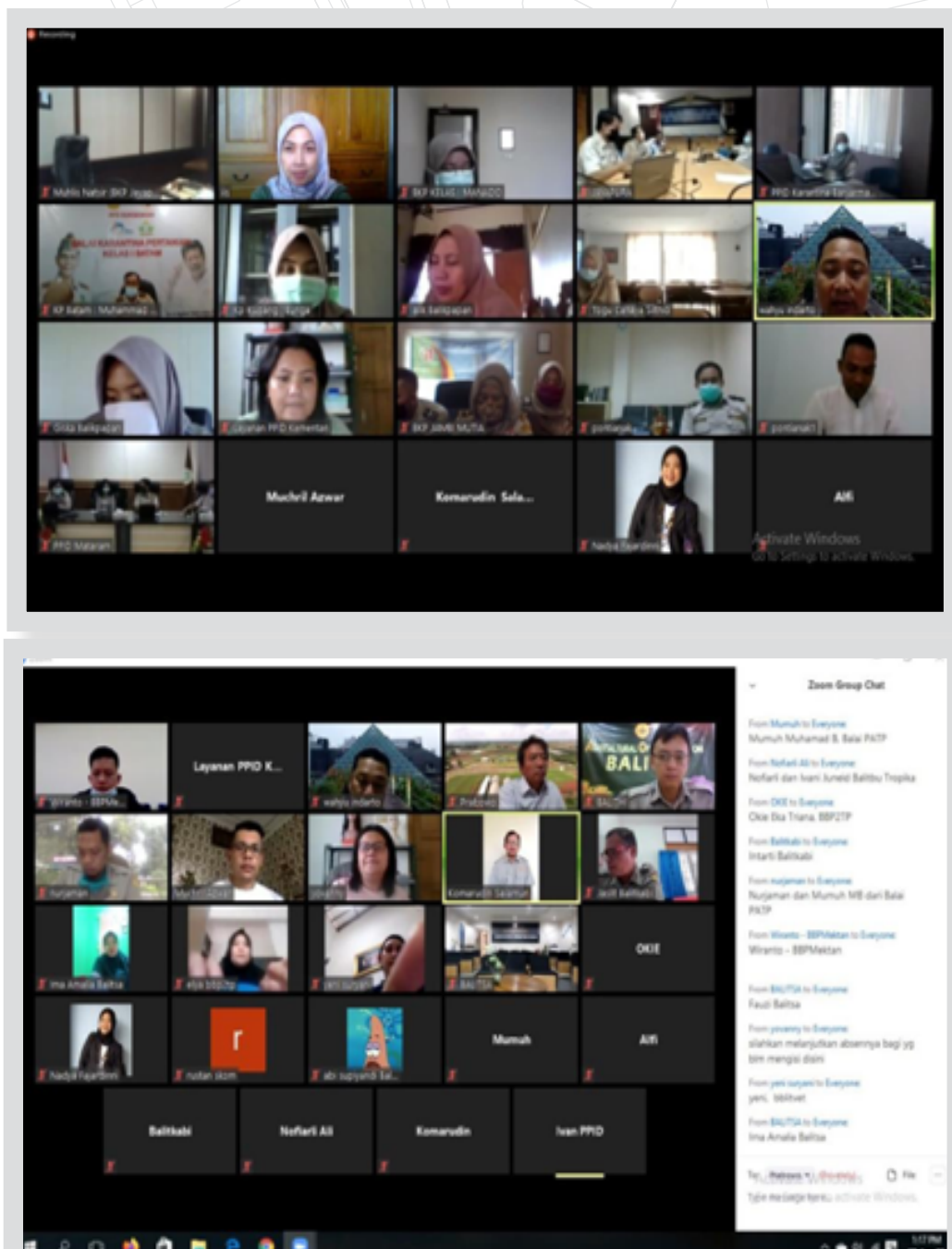
- Bimtek Online Sesi I dan II tanggal 24 April 2020, sesi I diikuti oleh PPID Badan Litbang Pertanian, BPTP, dan Loka Penelitian. Sesi II diikuti oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 11.
Bimtek PPID Sesi I dan II

#9 Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- Bimtek Online Sesi I dan II tanggal 27 April 2020, sesi I diikuti oleh PPID Balai Karantina Pertanian Kelas I lingkup Kementerian Pertanian. Sesi II diikuti oleh BBPPTP dan BB Mektan.

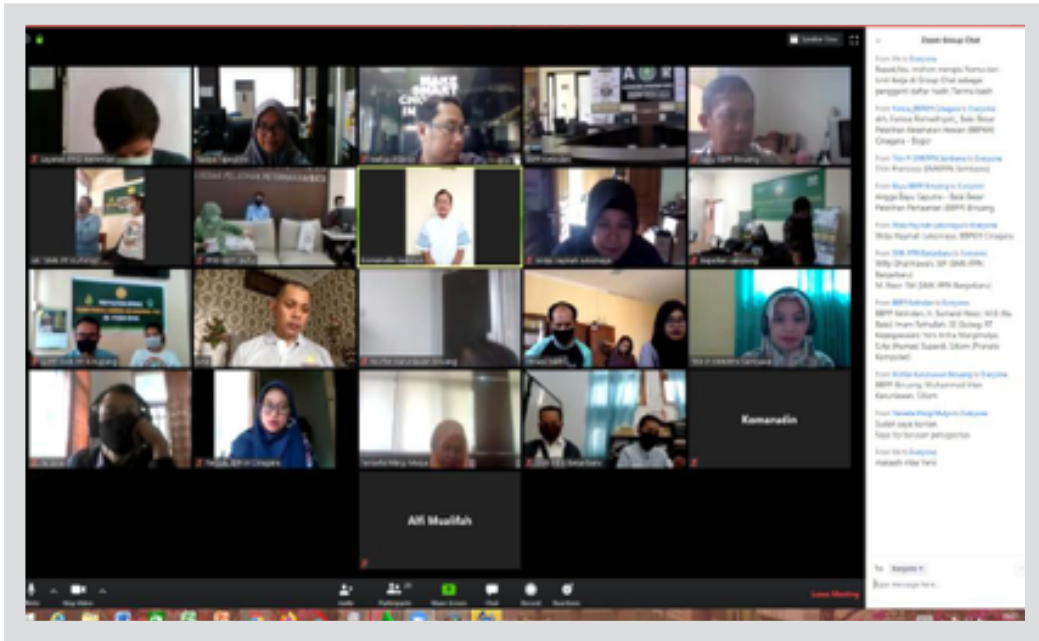


Gambar 12.
Bimtek PPID Sesi I dan II

#9

Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- Bimtek Online Sesi I dan II tanggal 28 April 2020, sesi I diikuti oleh PPID BBPP dan SMK Pembangunan Negeri.. Sesi II diikuti oleh Balijestro dan BPT lingkup Kementan.



Gambar 13. Bimtek PPID Sesi I dan II

- Bimtek Online Sesi I dan II tanggal 29 April 2020, sesi I diikuti oleh PPID BPMSP dan BPTU. Sesi II diikuti oleh Balai Besar Karantina Pertanian dan Puslitbangtan.

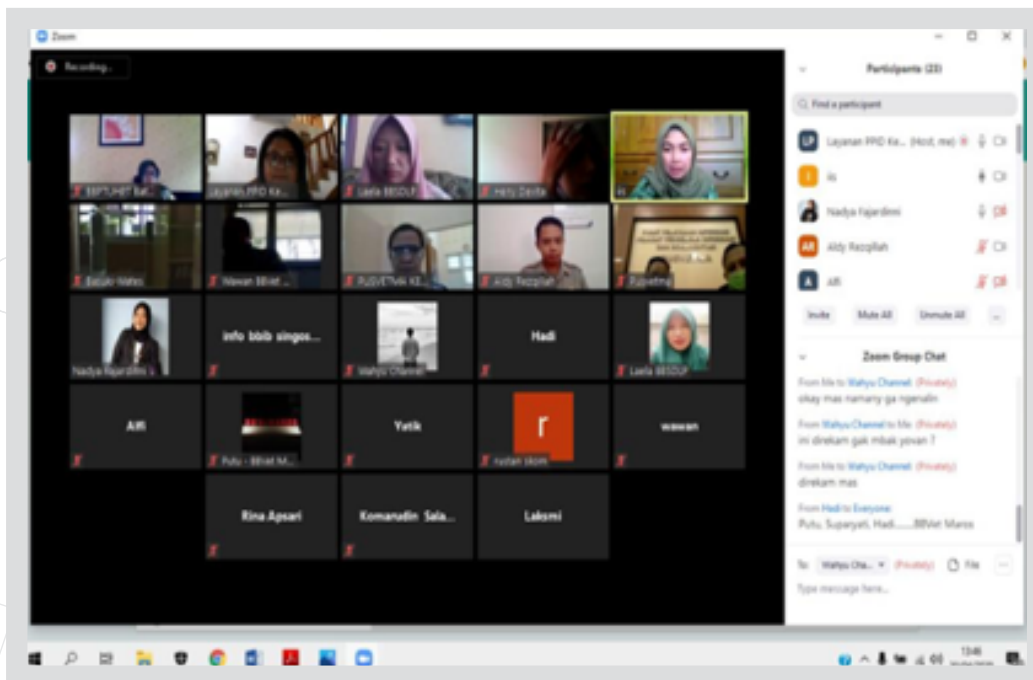


Gambar 14.
 Bimtek PPID Sesi I dan II

#9

Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- Bimtek Online Sesi I dan II tanggal 30 April 2020, sesi I diikuti oleh PPID Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Balai Karantina Pertanian Kelas I dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dll. Sesi II diikuti Pusvetma Surabaya, BBMPS



Gambar 15.
Bimtek PPID Sesi I dan II

Hasil bimbingan teknis sepanjang Tahun 2020 memperlihatkan hal positif antara lain peningkatan standar pelayanan informasi publik di PPID UK/ UPT, yang tercermin pada hasil monitoring dan evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik selama bulan Juni- Juli 2020 melalui Self Assesment Questionnaire, Portal PPID dan pengisian Transparansi Kinerja di Portal PPID.

b. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian - selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Pejabat Tinggi Madya sebagai Pimpinan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon I, melakukan penandatanganan Komitmen Bersama bertempat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta.

Komitmen ini merupakan bukti keseriusan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik yang merupakan hak konstitusional tiap masyarakat. Pada kegiatan ini, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya komitmen dan dukungan pimpinan, diantaranya dengan menyediakan anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang kompeten.



Gambar 16.
Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik



**KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Kami, Pejabat Tinggi Madya sebagai Pimpinan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon I, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di seluruh UK/ UPT melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, 30 Juli 2019

Sekretaris Jenderal

Momon Rusmono

Inspektur Jenderal Pertanian

Justan Riduan Siahaan

Direktur Jenderal
Tanaman Pangan

Suwandi

Direktur Jenderal Hortikultura

Prihasto Setyanto

Direktur Jenderal Perkebunan

Kasdi Subagyo

Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan

I Ketut Darmita

Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian

Sarwo Edhy

Kepala Badan Karantina Pertanian

Ali Jamil

Kepala Badan Litbang Pertanian

Fadry Djufry

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Agung Hendriadi

Kepala Badan PPSDMP

Dedli Nursyamsi

c. **Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian**

Dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sebagai badan publik melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Pemeringkatan ini dilaksanakan guna memberikan apresiasi kepada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang telah membuka informasi publik melalui situs web secara transparan. Pemeringkatan ini juga mendorong agar tiap unit kerja/unit pelaksana teknis untuk meningkatkan kualitas website dan portal PPID serta menjadikan website dan portal PPID sebagai situs acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat. Ada 175 PPID unit kerja/unit pelaksana teknis yang dinilai dalam pemeringkatan ini.

Adapun tahapan jadwal penilaian untuk pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :

- Penilaian Komitmen PPID → Komitmen PPID dinilai berdasarkan kepatuhan dalam mengumpulkan laporan tahunan dan laporan bulanan PPID secara tepat waktu serta kehadiran PPID Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis pada kegiatan PPID utama. Jangka waktu penilaian ini yaitu bulan Januari hingga Juli 2020.
- Penilaian melalui web dan Self Assesment Questionaire (SAQ) → Indikator penilaian diantaranya : (1) Kebijakan Internal Kementan; (2) User Experience; (3) Tata Kelola Situs Web; (4) Informasi Mengenai Kegiatan

dan Kinerja Badan Publik; (5) Informasi Mengenai Laporan Keuangan Badan Publik; (6) Informasi Lainnya yang Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya; dan (7) Inovasi Aplikasi Situs Web. Penilaian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni – 22 Juni 2020.

- Penilaian terhadap pemanfaatan Portal PPID → Indikator ini dinilai berdasarkan pemanfaatan PPID UK/UPT terhadap aplikasi Portal PPID yaitu melalui Silayan Online, Database dokumen dan menu transparansi kinerja. Penilaian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juni – 20 Juli 2020.

Penilaian melalui Komitmen, Website, SAQ dan Portal PPID menentukan nominasi 5 (lima) terbaik untuk UK/UPT kategori Eselon I, Eselon II dan Eselon III. Tahap selanjutnya adalah wawancara pejabat PPID secara virtual melalui zoom meeting dengan mengundang Dewan Juri yang terdiri dari Tya Tirta Sari (Komisi Informasi Pusat), Josep Kristiadi (Centre of Strategies and International Studies), Moh. Yamin (Pegiat Keterbukaan Informasi Publik/ Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia), dan Astrid Debora (Indonesian Center for Enviromental Law). Wawancara dilakukan untuk mengetahui kepedulian pimpinan dalam memberikan pelayanan informasi di UK/ UPT masing-masing serta mengetahui kondisi pelaksanaan PPID pada tiap UK/UPT yang mendapat nominasi pemeringkatan termasuk sarana pendukungnya. Setelah melalui rapat pleno dewan juri secara online, ditentukan pemenang untuk setiap kategori baik Eselon I, Eselon II maupun Eselon III, sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020 KATEGORI ESELON I

Tabel 3.

Peringkat	Nama Instansi	Predikat
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Informatif
2	Badan Karantina Pertanian	Informatif
3	Badan Ketahanan Pangan	Informatif
4	Inspektorat Jenderal	Informatif
5	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Informatif
6	Direktorat Jenderal Perkebunan	Menuju Informatif
7	Direktorat Jenderal Hortikultura	Menuju Informatif
8	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	Cukup Informatif
9	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Cukup Informatif
10	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Cukup Informatif

HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020 KATEGORI ESELON II

Peringkat	Nama Instansi	Predikat
1	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi	Informatif
2	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	Informatif
3	Pusat Veteriner Farma Surabaya	Informatif
4	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Menuju Informatif
5	Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian	Menuju Informatif
6	Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta	Menuju Informatif
7	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Menuju Informatif
8	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Padi	Menuju Informatif
9	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Menuju Informatif
10	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Menuju Informatif
11	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian	Menuju Informatif
12	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	Menuju Informatif
13	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur	Menuju Informatif
14	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	Menuju Informatif

HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020
KATEGORI ESELON II

Tabel 4.

Peringkat	Nama Instansi	Predikat
15	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Baturraden	Menuju Informatif
16	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	Menuju Informatif
17	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	Menuju Informatif
18	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Cukup Informatif
19	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Cukup Informatif
20	Balai Besar Veteriner Wates	Cukup Informatif
21	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	Cukup Informatif
22	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Cukup Informatif
23	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	Cukup Informatif
24	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	Cukup Informatif
25	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	Cukup Informatif
26	Balai Besar Veteriner Denpasar	Cukup Informatif
27	Balai Besar Penelitian Veteriner	Cukup Informatif
28	Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang	Cukup Informatif
29	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	Cukup Informatif
30	Politeknik Pembangunan Pertanian Pertanian Bogor	Cukup Informatif
31	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	Cukup Informatif
32	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	Cukup Informatif
33	Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	Cukup Informatif
34	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	Cukup Informatif
35	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Cukup Informatif
36	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Cukup Informatif
37	Balai Besar Peternakan dan Kesehatan Hewan Cinagara	Cukup Informatif
38	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta	Cukup Informatif
39	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	Cukup Informatif
40	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	Kurang Informatif
41	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Genetika Pertanian	Kurang Informatif
42	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Kurang Informatif
43	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kurang Informatif
44	Balai Besar Veteriner Maros	Kurang Informatif
45	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	Kurang Informatif

HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020 KATEGORI ESELON III

Tabel 5.

Peringkat	Nama Instansi	Predikat
1	Balai Embrio Ternak Cipelang	Informatif
2	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	Informatif
3	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu	Informatif
4	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu	Informatif
5	Balai Penelitian Tanaman Industgri dan Penyegar	Informatif
6	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi	Informatif
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten	Informatif
8	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua	Informatif
9	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke	Informatif
10	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu	Informatif
11	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar	Informatif
12	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	Menuju Informatif
13	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Menuju Informatif
14	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda	Menuju Informatif
15	Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate	Menuju Informatif
16	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Menuju Informatif
17	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah	Menuju Informatif
18	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah	Menuju Informatif
19	Balai Penelitian Tanaman Palma	Menuju Informatif
20	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara	Menuju Informatif
21	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh	Menuju Informatif
22	Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	Menuju Informatif
23	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong	Menuju Informatif
24	Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung	Menuju Informatif
25	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun	Menuju Informatif
26	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare	Menuju Informatif
27	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon	Menuju Informatif
28	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika	Menuju Informatif
29	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	Menuju Informatif
30	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak	Menuju Informatif
31	Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi	Menuju Informatif

HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020
KATEGORI ESELON III

Peringkat	Nama Instansi	Predikat
32	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	Menuju Informatif
33	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau	Menuju Informatif
34	Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang	Menuju Informatif
35	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta	Menuju Informatif
36	Loka Penelitian Sapi Potong Grati	Menuju Informatif
37	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat	Menuju Informatif
38	Balai Penelitian Agroklimat dan Higiologi	Menuju Informatif
39	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat	Menuju Informatif
40	Balai Penelitian Jeruk dan Buah Sub Tropika	Menuju Informatif
41	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara	Menuju Informatif
42	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	Menuju Informatif
43	Balai Penelitian Tanah	Menuju Informatif
44	Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam	Menuju Informatif
45	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau	Menuju Informatif
46	Balai Veteriner Banjarbaru	Menuju Informatif
47	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta	Menuju Informatif
48	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara	Menuju Informatif
49	Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	Cukup Informatif
50	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung	Cukup Informatif
51	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang	Cukup Informatif
52	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur	Cukup Informatif
53	Balai Penelitian Tanaman Hias	Cukup Informatif
54	Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari	Cukup Informatif
55	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	Cukup Informatif
56	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan	Cukup Informatif
57	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	Cukup Informatif
58	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Alam	Cukup Informatif
59	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat	Cukup Informatif
60	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Negeri Sembawa	Cukup Informatif
61	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Pandang Mangatas	Cukup Informatif

**HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020
KATEGORI ESELON III**

Peringkat	Nama Instansi	Predikat
62	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	Cukup Informatif
63	Balai Penelitian Ternak	Cukup Informatif
64	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Indrapuri	Cukup Informatif
65	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika	Cukup Informatif
66	Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	Cukup Informatif
67	Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura	Cukup Informatif
68	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	Cukup Informatif
69	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan	Cukup Informatif
70	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	Cukup Informatif
71	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju	Cukup Informatif
72	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Palohari	Cukup Informatif
73	Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Cukup Informatif
74	Balai Veteriner Bandar Lampung	Cukup Informatif
75	Balai Penelitian Tanaman Serealia	Cukup Informatif
76	Balai Veteriner Medan	Cukup Informatif
77	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	Cukup Informatif
78	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat	Cukup Informatif
79	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	Cukup Informatif
80	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Siborong-Borong	Cukup Informatif
81	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku	Cukup Informatif
82	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong	Cukup Informatif
83	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya	Cukup Informatif
84	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat	Cukup Informatif
85	Balai Veteriner Bukit Tinggi	Cukup Informatif
86	Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin	Cukup Informatif
87	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung	Cukup Informatif
88	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung	Cukup Informatif
89	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali	Cukup Informatif
90	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	Cukup Informatif
91	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara	Cukup Informatif

HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020
KATEGORI ESELON III

Peringkat	Nama Instansi	Predikat
92	Loka penelitian Kambing Potong Sei Putih	Cukup Informatif
93	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	Cukup Informatif
94	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan	Cukup Informatif
95	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	Cukup Informatif
96	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa	Cukup Informatif
97	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Sembawa	Cukup Informatif
98	Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan	Cukup Informatif
99	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian	Cukup Informatif
100	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur	Cukup Informatif
101	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat	Cukup Informatif
102	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	Cukup Informatif
103	Balai Pengelola Alih Teknologi	Kurang Informatif
104	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan	Kurang Informatif
105	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	Kurang Informatif
106	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Kurang Informatif
107	Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang	Kurang Informatif
108	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari	Kurang Informatif
109	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo	Kurang Informatif
110	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Denpasar	Kurang Informatif
111	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan	Kurang Informatif
112	Balai Uji Terap dan Teknik Metode Karantina Pertanian	Kurang Informatif
113	Balai Veteriner Subang	Kurang Informatif
114	Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang	Kurang Informatif
115	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh	Kurang Informatif
116	Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo	Kurang Informatif
117	Loka Penelitian Penyakit Tungro Lanrang	Kurang Informatif
118	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	Kurang Informatif
119	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	Kurang Informatif
120	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman	Kurang Informatif

#9

Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Penyerahan piagam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Pada kegiatan tersebut, dilakukan secara virtual online maupun offline mengingat kondisi pandemic covid-19 serta harus

menjaga protokol kesehatan, untuk kegiatan offline hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Komisioner Komisi Informasi Pusat serta Tim Juri Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 17.
Penyerahan Piagam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik



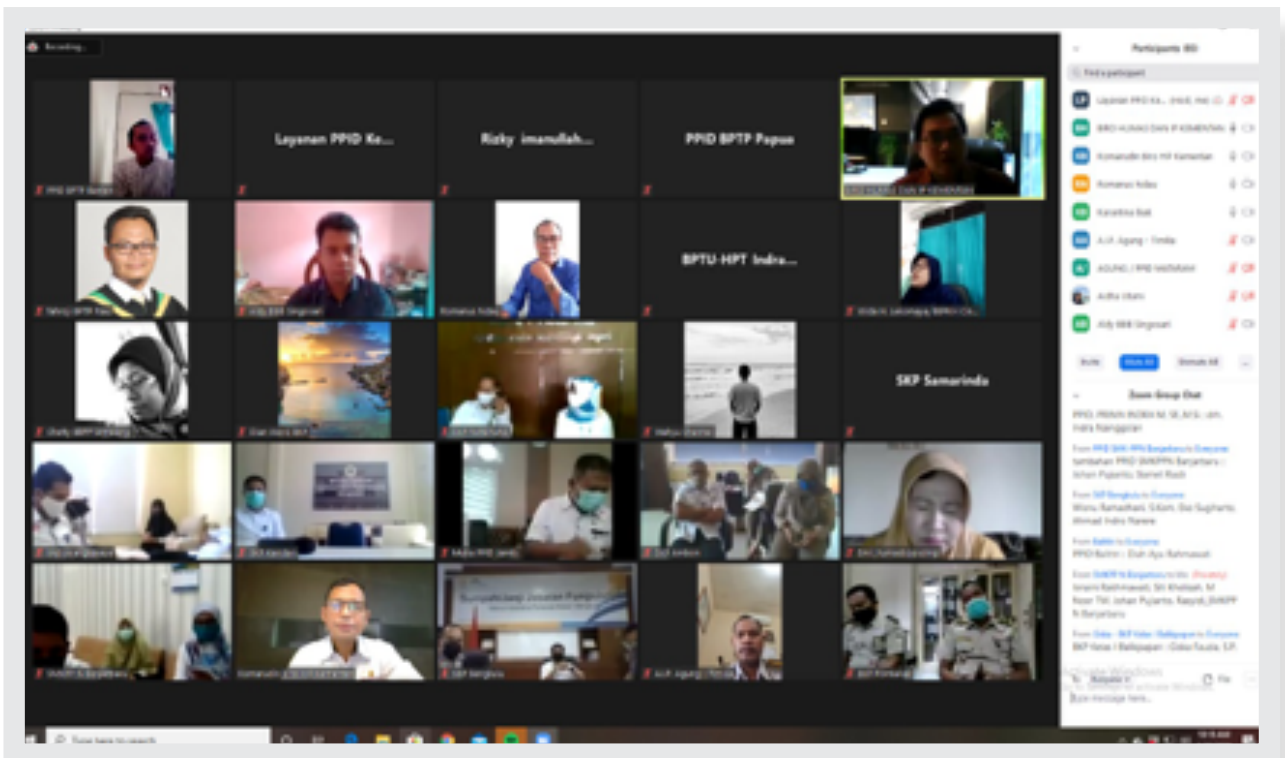
d. Webinar Keterbukaan Informasi Publik

Dengan capaian sebagai Badan Publik Informatif, Kementerian Pertanian terus berupaya memberikan inovasi untuk memudahkan publik dalam mengakses dan mendapatkan informasi bidang pertanian. Untuk itu Kementerian Pertanian melakukan Kegiatan Webinar yang dilakukan melalui aplikasi *zoom meeting*.

Program dan kebijakan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di Masa Pandemic Covid-19 sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden dan DPR-RI yaitu untuk membantu komunitas petani yang

terdampak pandemic serta mendukung ketahanan pangan sebagai bentuk pengamanan sosial (*Social Safety Net*).

Berinovasi menjadikan PPID Kementan bagian dari 'kebutuhan' masyarakat untuk mengakses informasi pertanian. Bagaimana publik menjadikan apa yang disajikan Kementan sebagai sebuah kebutuhan sehingga masyarakat mau mengakses informasi tersebut. Selain itu segera merumuskan informasi serta merta pada sektor pertanian yang harus diberikan jauh hari dan memastikan informasi tersebut sampai ke petani dan masyarakat luas, bukan hanya dipublikasikan.



Gambar 18.
Webinar Keterbukaan Informasi Publik

#10

Penyempurnaan Modul Aplikasi Pendukung Informasi Publik (Portal PPID)

Modul Aplikasi Pendukung Informasi Publik (Portal PPID) merupakan situs web yang diintegrasikan dengan sistem aplikasi pendukung informasi publik berbasis online yang dikembangkan PPID Utama Kementerian. Pengembangan Portal PPID ke arah multisite platform, menuntut perubahan mendasar pada pondasi frame work yang ada. Dengan database MySQL, data data sebelumnya dimigrasi sehingga portal PPID yang baru dapat digunakan oleh seluruh

PPID Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian.

Untuk kesempurnaan Portal PPID Kementan, tim pengelola Portal PPID Kementan melakukan penyempurnaan beberapa menu agar pelayanan informai publik lebih efektif dan transparan dalam pengelolaan informai publik sesuai tatacara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disebut dengan UU KIP.



Gambar 19. Site Portal PPID Utama Kementerian Pertanian

#10 Penyempurnaan Modul Aplikasi Pendukung Informasi Publik (Portal PPID)

Penyempurnaan modul Portal PPID pada tahun 2020 dilakukan penambahan modul petugas pelayanan informasi publik dalam memverifikasi permohonan informasi public yang telah lengkap persyaratannya, setelah diverifikasi permohonan tersebut akan berpindah posisi ke Pejabat PPID untuk dilaksanakan pemberitahuan. Selain itu, pada pemberitahuan permohonan informasi

publik, Pejabat PPID dapat melampirkan informasi dan/atau dokumen secara langsung pada aplikasi, serta langsung terkirim ke email pemohon informasi publik. Sebelumnya, hal ini dilakukan terpisah dengan menggunakan aplikasi dan email instansi. Portal PPID juga telah disempurnakan sehingga waktu atau argo permohonan dapat disesuaikan berdasarkan durasi jam/hari kerja.

The screenshot displays a web interface for a Public Information Request (PPID) portal. At the top, there is a green header with the user's name 'Fandi Edi Triyoko (Pencarian)' and the date '30 March 2021 | 13:19:47'. Below the header, there are navigation tabs: 'Daftar', 'Permohonan', 'Logans', 'Attachment', and 'Transfer'. The main content area shows a form for a request with the following details:

- Nama Lengkap:** Fandi Edi Triyoko
- Pejabat:** Admin
- Tipe:** Permohonan
- ID KTP:** 523040000000
- NIK:** 520000000
- Alamat:** J. DL. WILAHU GEPIL BELAH BANGKIT
- NO. Telpun:** 08123456789
- Email:** fandi@ppid.go.id

Below the form, there are radio button options for 'Cara Menyerah Informasi' and 'Cara Mendapatkan Salinan Informasi'.

Gambar 20.
Pada lembar
permohonan
dashboard petugas
PPID terdapat
tombol verifikasi



#11

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Badan Publik

Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan dibentuknya Komisi Informasi, maka sejak itu pula Kementerian Pertanian turut dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut dengan membentuk PPID dan kemudian turut berpartisipasi dalam kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan lembaga pembina keterbukaan informasi publik ini. Meskipun hasil dari suatu pemeringkatan memang tidak berarti segalanya, namun hal tersebut memicu motivasi untuk menjadi lebih baik melalui prestasi yang diraih.

Tahun 2019, PPID Kementerian Pertanian mendapatkan Predikat Keterbukaan Informasi

Publik dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 96.03 (indeks 100). Predikat ini merupakan klaster tertinggi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik. Hasil ini melebihi target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dengan indikator nilai hasil monev Keterbukaan Informasi Publik pada PPID lingkup Kementerian Pertanian yaitu nilai 82.

Meskipun penuh dinamika di tahun 2020 ini dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di tengah pandemic Covid-19, Kementerian Pertanian kembali mendapatkan penghargaan Predikat Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 97,99 (indeks 100).



Gambar 21.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengumumkan Predikat Badan Publik Informatif untuk Kementerian Pertanian secara virtual melalui zoom meeting

#12

Kerjasama PPID Kementerian Pertanian dengan Stakeholder

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Good Governance*) dengan mengacu prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Kementerian Pertanian turut berpartisipasi mewujudkan *good governance* tersebut, maka PPID Kementerian Pertanian dalam kegiatan-kegiatannya

sering mengundang Komisi Informasi Pusat untuk memperoleh informasi dan bertukar informasi dalam melayani permohonan informasi.

Selain itu, PPID Kementerian Pertanian turut mendukung implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan hadir dalam berbagai forum PPID yang diselenggarakan oleh Badan Publik atau Lembaga lainnya.

Pada tahun 2020 ini Kementerian Pertanian juga berkesempatan untuk menyampaikan materi atas undangan dari Kementerian atau Lembaga lain baik secara virtual online maupun offline, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta ngobrol informatif bareng PPID DPR RI secara live Instagram.

#13

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian tidak menangani sengketa informasi publik yang diajukan pemohon ke PPID Utama.

Namun ada 32 permohonan keberatan. Dimana dari total 32 permohonan keberatan yang ditujukan ke PPID Utama dapat diselesaikan secara internal.

#14

Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik untuk PPID Utama Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- Pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian tidak ada kendala karena semua proses pelayanan permohonan informasi publik sudah terakomodir melalui Portal PPID
- Pelayanan informasi publik di era new normal menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan proses Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik untuk PPID UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut :

- Masih banyaknya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan yang belum terekap dan diusulkan di masing-masing UK/ UPT lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini disebabkan karena belum ada pemahaman terkait penyusunan daftar informasi tersebut.
- Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada UK/ UPT di lingkungan Kementerian Pertanian, sehingga masih diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk mengedukasi petugas PPID.

#15

Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik

Rekomendasi rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi yang bersinambungan dalam penyusunan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan di masing-masing PPID UK/ UPT lingkup Kementerian Pertanian.

- Melakukan edukasi pendampingan terhadap petugas PPID dengan Bimbingan Teknik yang berkesinambungan serta monitoring dan evaluasi UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian terkait pelayanan dan pengelolaan informasi publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat PPID Utama

Gedung Pusat Informasi Agribisnis
Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan
Jakarta Selatan 12550, Indonesia



021-780 6131 - 780 4116 Est 1032 / 1022



021-7883 8845

Layanan Informasi Publik



0812 9293 7867



layanan-ip@pertanian.go.id



<http://ppid.pertanian.go.id>